



## UPAYA PEMERINTAH DALAM PENANGANAN HAMBATAN PELAPORAN EKSPOR DI BOYOLALI

Sholikhah Dwi Hastuti<sup>1</sup>, Sherena Wahyutari<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta

<sup>1</sup>e-mail: [sholikahdwi204@gmail.com](mailto:sholikahdwi204@gmail.com)

<sup>2</sup>e-mail: [sherena@stiesurakarta.ac.id](mailto:sherena@stiesurakarta.ac.id)

Penulis korespondensi: Sholikhah Dwi Hastuti

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya pemerintah Kabupaten Boyolali, khususnya melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian (DISDAGPERIN), dalam menangani hambatan pelaporan ekspor. Pelaporan ekspor memiliki peran penting dalam mendukung kelancaran perdagangan internasional dan menjadi dasar penyusunan kebijakan ekonomi daerah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, serta diuji keabsahannya melalui triangulasi sumber, teknik, dan waktu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah melakukan sosialisasi, pendampingan, dan penguatan administrasi kepada pelaku usaha, namun pelaksanaan kebijakan tersebut belum optimal. Hambatan utama meliputi rendahnya kesadaran pelaku usaha, terbatasnya regulasi yang bersifat mengikat, dan belum tersedianya sistem pelaporan digital yang terintegrasi. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia dan koordinasi antarlembaga turut memengaruhi efektivitas pelaporan. Pemerintah daerah perlu memperkuat regulasi, meningkatkan kapasitas aparatur, serta mengembangkan sistem digital agar pelaporan ekspor menjadi lebih efisien dan akurat.

**Kata kunci:** Upaya Pemerintah, Pelaporan Ekspor, DISDAGPERIN Boyolali

## PENDAHULUAN

Kabupaten Boyolali merupakan salah satu daerah di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki luas wilayah sekitar 1.015,10 km<sup>2</sup>, dengan potensi besar di sektor pertanian, peternakan, dan industri pengolahan (BPS Kabupaten Boyolali, 2023). Kabupaten Boyolali dikenal memiliki potensi ekonomi yang cukup besar karena letaknya yang strategis, berada di antara dua kota besar yaitu Surakarta dan Semarang, menjadikan Kabupaten Boyolali sebagai wilayah yang terus mengalami pertumbuhan dalam berbagai sektor, khususnya perdagangan dan industri. Pemerintah daerah terus mendorong peningkatan investasi dan produktivitas usaha, baik skala kecil, menengah, maupun besar, sebagai bagian dari upaya percepatan pembangunan ekonomi daerah. Menurut Kusumastuti (2020) secara geografis dan strategis, Boyolali memiliki posisi penting dalam perekonomian antar wilayah di Jawa Tengah. Daerah ini berkembang menjadi kawasan industri dan perdagangan karena aksesibilitasnya yang baik dan kebijakan pemerintah daerah yang pro-investasi. Seiring dengan meningkatnya aktivitas ekonomi, kebutuhan akan pelayanan publik yang berkaitan dengan sektor perdagangan dan perindustrian semakin kompleks. Untuk itu, pemerintah Kabupaten Boyolali melalui DISDAGPERIN (Dinas Perdagangan dan Perindustrian) memiliki peranan penting dalam mengelola dan memfasilitasi berbagai kegiatan yang berkaitan dengan tata niaga, perizinan usaha, pengawasan distribusi barang, hingga penguatan kapasitas pelaku usaha lokal. DISDAGPERIN Kabupaten Boyolali adalah instansi pelayanan publik bidang perdagangan dan perindustrian di Kabupaten Boyolali yang bertanggung jawab atas pengelolaan sektor perdagangan dan perindustrian di Kabupaten Boyolali. Adapun Visi DISDAGPERIN Kabupaten Boyolali adalah menjadikan Boyolali yang maju, nyaman, berdaya saing, dan ramah investasi menuju Indonesia Emas untuk tahun 2045. Peran DISDAGPERIN untuk membantu UMKM menembus pasar ekspor dalam bidang perdagangan menurut Pemerintah Kabupaten Boyolali (2024), yaitu melaksanakan pembinaan dan bimbingan kepada para pelaku usaha, perlindungan konsumen terhadap barang dan

jasa, pemantauan harga kebutuhan pokok di pasar rakyat dan pusat perbelanjaan. DISDAGPERIN Kabupaten Boyolali telah melakukan pengembangan dan pemeliharaan sarana perdagangan hingga mampu bersaing dengan pasar modern serta peningkatan pendapatan daerah, selain itu untuk mengembangkan potensi UKM dan UMKM, DISDAGPERIN Kabupaten Boyolali melakukan peningkatan promosi produk daerah dan komoditas ekspor di dalam negeri maupun luar negeri melalui pameran dan melaksanakan kemitraan dengan lembaga pengusaha.

Ekspor merupakan salah satu komponen penting dalam perekonomian suatu negara karena mampu memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan perolehan devisa negara. Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Pasal 1, ekspor diartikan sebagai kegiatan mengeluarkan barang dari daerah ke luar negeri. Secara sederhana, ekspor dapat diartikan sebagai kegiatan pengiriman dan penjualan barang-barang dari dalam negeri ke luar negeri. Kegiatan ini bukan hanya mencerminkan daya saing suatu negara di pasar internasional, tetapi juga menjadi indikator keberhasilan sektor industri dan perdagangan dalam menghasilkan produk-produk yang diminati oleh pasar global. Dalam era globalisasi dan integrasi ekonomi internasional saat ini, kegiatan ekspor memegang peran yang sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, baik pada tingkat nasional maupun daerah. Ekspor menjadi salah satu sumber utama devisa negara yang berkontribusi terhadap peningkatan daya saing produk lokal di pasar internasional. Oleh karena itu, pengelolaan ekspor secara profesional, terencana, dan berkelanjutan menjadi tanggung jawab bersama, termasuk oleh DISDAGPERIN Kabupaten Boyolali. Perdagangan internasional yang dilakukan melalui aktivitas ekspor tidak hanya mendorong peningkatan daerah, tetapi juga berperan dalam menciptakan lapangan kerja dan peningkatan produktivitas masyarakat. Menurut Amir (2004), kegiatan ekspor memiliki manfaat signifikan bagi perekonomian nasional karena dapat menambah cadangan devisa, meningkatkan pendapatan nasional, serta mengurangi tingkat pengangguran. Manfaat ini menunjukkan bahwa peningkatan ekspor memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, termasuk di Kabupaten Boyolali, sehingga pelaporan ekspor menjadi aspek penting yang perlu dikelola dengan baik oleh pemerintah daerah dalam mencapai pertumbuhan perekonomian negara, tentu membutuhkan sektor yang dapat menghasilkan produk yang berpotensi untuk dikembangkan di pasar baik di dalam maupun di luar negeri, Industri garmen merupakan salah satu sektor unggulan yang berkontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah, khususnya di Kabupaten Boyolali. Perkembangan nilai ekspor dari sektor garmen ini menjadi indikator penting dalam menilai daya saing dan ekonomi daerah, karena data yang saya dapat dari DISDAGPERIN Kabupaten Boyolali Perusahaan garmen memiliki nilai ekspor yang selalu tinggi. Badan Pusat Statistik (2021) Kabupaten Boyolali Jawa Tengah berhasil mencapai angka ekspor garmen tertinggi selama beberapa dekade terakhir, dengan nilai USD 425 juta dalam waktu setahun. Berdasarkan jumlah tersebut 40% diantaranya diekspor ke Tiongkok. Dalam konteks pembangunan ekonomi, kegiatan ekspor memiliki peran penting karena menjadi sumber devisa, memperluas pasar produk lokal, dan membuka lapangan kerja baru. Komoditas unggulan ekspor Kabupaten Boyolali meliputi garmen, tekstil, benang tenun, furniture, serta kerajinan tembaga dan kuningan. Berdasarkan data DISDAGPERIN Kabupaten Boyolali tahun 2021, nilai ekspor nonmigas sektor industri mencapai USD 343,5 juta, dengan kontribusi terbesar berasal dari tekstil USD 152,48 juta, benang tenun USD 65,2 juta, dan pakaian jadi USD 44,6 juta. Angka tersebut menunjukkan bahwa Boyolali memiliki kekuatan utama pada industri padat karya, khususnya sektor garmen dan tekstil. Perusahaan-perusahaan di Boyolali telah berkontribusi terhadap peningkatan ekspor daerah, yang akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi di Boyolali. Untuk mendukung data kelola perdagangan yang baik, setiap perusahaan yang melakukan kegiatan ekspor wajib melaporkan data ekspornya secara rutin kepada DISDAGPERIN Kabupaten Boyolali, namun dari data yang saya dapatkan dari DISDAGPERIN Kabupaten Boyolali masih terdapat beberapa perusahaan di Kabupaten Boyolali yang belum melaporkan data ekspor secara tepat waktu kepada DISDAGPERIN Kabupaten Boyolali, sehingga menghambat akurasi data ekspor Daerah dan berpotensi mempengaruhi data perdagangan yang efektif. Keterlambatan pelaporan ini tidak hanya menyulitkan pihak dari DISDAGPERIN Kabupaten Boyolali dalam proses evaluasi data ekspor, tetapi juga dapat menghambat perumusan kebijakan perdagangan yang tepat sasaran. Pelaporan yang tidak tepat waktu akan menyebabkan data ekspor yang kurang akurat dan tidak real time, sehingga mengurangi efektivitas DISDAGPERIN Kabupaten Boyolali dalam mengawasi dan mengembangkan ekspor daerah. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut untuk memahami faktor-faktor yang menyebabkan perusahaan terlambat melaporkan data ekspor dan bagaimana peran DISDAGPERIN Kabupaten Boyolali dalam mengatasi masalah tersebut, guna meningkatkan efisiensi sistem pelaporan ekspor di Kabupaten. Dalam kegiatan perdagangan Internasional, pelaporan ekspor merupakan salah satu proses administratif yang sangat penting. Menurut Susanti (2025). Manfaat dari pelaporan

sangatlah banyak, salah satunya yaitu dapat dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan yang akan berpengaruh pada perkembangan usahanya. Pelaporan ini tidak hanya menjadi syarat legalitas dalam pengiriman barang ke luar negeri, tetapi juga menjadi dasar bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan ekspor, memantau arus barang, serta memastikan penerimaan negara dari sektor perdagangan luar negeri. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya pemerintah daerah, khususnya DISDAGPERIN Kabupaten Boyolali, dalam menangani hambatan pelaporan ekspor, serta mengidentifikasi faktor-faktor penyebab rendahnya kepatuhan pelaporan oleh pelaku usaha. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam bidang kebijakan publik dan administrasi perdagangan, serta menawarkan rekomendasi praktis untuk memperkuat sistem pelaporan ekspor daerah melalui penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparatur, dan digitalisasi proses pelaporan.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Kebijakan Publik**

Kebijakan Publik merupakan serangkaian keputusan dan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan publik. Dunn (2003) menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah proses yang mencakup formulasi, implementasi, dan evaluasi keputusan pemerintah guna mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks pelaporan ekspor, kebijakan publik berperan dalam menentukan regulasi, prosedur administrasi, serta mekanisme pengawasan yang menjamin kelancaran arus barang lintas negara. Menurut Arderson (2003), kebijakan publik tidak hanya berbentuk keputusan formal, tetapi juga mencakup tindakan atau non-tindakan pemerintah dalam merespon suatu persoalan. Oleh karena itu, efektivitas kebijakan nasional ke dalam konteks lokal dengan dukungan sumber daya dan regulasi yang jelas. Dalam penelitian ini, teori kebijakan publik digunakan untuk menganalisis bagaimana Pemerintah DISDAGPERIN Kabupaten Boyolali merumuskan kebijakan dan mengambil langkah-langkah strategi dalam menangani hambatan pelaporan ekspor oleh pelaku usaha.

### **Administrasi Publik**

Teori administrasi publik menekankan pentingnya efektivitas birokrasi dalam melaksanakan kebijakan pemerintah. Nicholas Henry (1999) mendefinisikan administrasi publik sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan program-program publik agar mencapai tujuan secara efisien. Sementara Woodrow Wilson (1887) menegaskan bahwa administrasi publik harus dipisahkan dari kepentingan politik dan berorientasi pada pelayanan profesional. Dalam konteks pelaporan ekspor, teori administrasi publik digunakan untuk menjelaskan bagaimana pemerintah daerah melalui DISDAGPERIN, menjalankan fungsi pelayanan publik termasuk pengawasan, pendampingan, dan fasilitasi pelaporan ekspor. Efektivitas administrasi publik tercermin dari kemampuan pemerintah menyediakan layanan pelaporan yang mudah, transparan, serta adaptif terhadap kebutuhan pelaku usaha, baik skala besar maupun UMKM.

### **Ekspor dan Perdagangan Internasional**

Ekspor merupakan salah satu bentuk kegiatan perdagangan internasional yang berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah. Salvatore (2011) menyatakan bahwa ekspor berfungsi memperluas pasar, meningkatkan devisa, serta memperkuat daya saing industri domestik. Menurut Krugman dan Obstfeld (2009), keberhasilan ekspor bergantung pada efisiensi sistem administrasi dan kepatuhan terhadap prosedur pelaporan. Dalam konteks Kabupaten Boyolali, kegiatan ekspor terutama pada sektor garmen, tekstil, dan kerajinan tembaga menjadi indikator penting perkembangan ekonomi daerah. Namun, kendala administratif dan lemahnya sistem pelaporan ekspor menyebabkan data perdagangan tidak akurat dan kebijakan pemerintah daerah menjadi kurang efektif. Oleh karena itu, teori perdagangan internasional menjadi dasar untuk menilai pentingnya pengelolaan pelaporan ekspor secara profesional, terintegrasi, dan sesuai regulasi global.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam upaya Pemerintah Kabupaten Boyolali melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian (DISDAGPERIN) dalam menangani hambatan pelaporan ekspor. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk memahami fenomena sosial secara kontekstual melalui interaksi langsung dengan subjek penelitian. Penelitian dilaksanakan di DISDAGPERIN Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Objek penelitian difokuskan pada kebijakan, implementasi, serta hambatan pelaporan ekspor yang dihadapi oleh pemerintah daerah dan pelaku usaha terlibat dalam kegiatan ekspor. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pegawai DISDAGPERIN Boyolali yang terlibat langsung dalam pengelolaan data serta pendampingan ekspor, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen resmi pemerintah seperti laporan tahunan DISDAGPERIN, peraturan terkait ekspor, dan berbagai literatur akademik yang membahas kebijakan publik serta perdagangan internasional. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui tiga metode utama, yaitu observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk melihat secara langsung proses administratif serta sistem pelaporan ekspor di DISDAGPERIN Kabupaten Boyolali. Wawancara mendalam dilakukan guna memperoleh informasi mengenai peran pemerintah, berbagai kendala yang dihadapi, serta upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan pelaporan. Sementara itu, dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan arsip, laporan, dan peraturan yang relevan dengan kegiatan pelaporan ekspor.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana (2020) yang meliputi tiga tahapan yang saling berhubungan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, peneliti melakukan proses pemilihan, penyederhanaan, dan pengelompokan data yang relevan dengan fokus penelitian. Hasil yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk narasi deskriptif agar mudah dipahami, dan tahap akhir berupa penarikan kesimpulan dilakukan melalui interpretasi terhadap temuan untuk menjawab rumusan masalah mengenai peran dan upaya pemerintah dalam pelaporan ekspor. Keabsahan data diuji dengan triangulasi sumber, teknik, dan waktu. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara antar informan triangulasi teknik dilakukan dengan merangkum semua hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi; sedangkan triangulasi waktu dilakukan dengan pengumpulan data pada waktu berbeda untuk memastikan konsistensi hasil. Metode ini mendukung tujuan penelitian untuk memperoleh pemahaman empiris dan kontekstual tentang bagaimana kebijakan dan implementasi pemerintah daerah memengaruhi efektivitas pelaporan ekspor di Kabupaten Boyolali, serta mengidentifikasi hambatan yang masih dihadapi dalam pelaksanaannya.

## HASIL dan PEMBAHASAN

### Peran Pemerintah dalam Merumuskan Kebijakan Pelaporan Ekspor

Hasil penelitian menunjukkan bahwa DISDAGPERIN Kabupaten Boyolali memiliki peran penting dalam mendukung kelancaran pelaporan ekspor di tingkat daerah. Namun, implementasi kebijakan masih menghadapi berbagai kendala struktural dan teknis. Secara umum, mekanisme pelaporan ekspor di Boyolali masih bersifat manual dan sederhana. Perusahaan pelaku ekspor biasanya menyampaikan laporan melalui *whatsapp* atau *email* yang berisi volume dan nilai ekspor. Data tersebut diterima oleh DISDAGPERIN Kabupaten Boyolali dan menjadi bahan laporan kepada Bupati serta dasar evaluasi kebijakan daerah. Meskipun sistem ini telah berjalan, regulasi yang mengatur pelaporan ekspor di tingkat daerah belum bersifat mengikat, sehingga pemerintah daerah belum memiliki landasan hukum yang kuat untuk menegakkan kepatuhan perusahaan. Akibatnya, masih banyak perusahaan yang melaporkan data ekspor secara tidak rutin. Upaya pemerintah daerah melalui kegiatan sosialisasi dan penyuluhan pernah dilakukan, namun frekuensinya menurun dalam beberapa tahun terakhir karena keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia. Hasil wawancara menunjukkan bahwa tidak adanya sanksi administratif bagi perusahaan yang lalai melaporkan ekspor juga menjadi penyebab rendahnya kepatuhan. Hal ini sejalan dengan pendapat Anderson (2003) dalam teori kebijakan publik, bahwa kebijakan tanpa instrumen penegakan cenderung tidak efektif dalam mengubah perilaku pelaku kebijakan. Dengan demikian, peran pemerintah dalam perumusan kebijakan pelaporan ekspor di Boyolali masih bersifat *persuasif*, belum mencapai tahap *regulatif*. Upaya peningkatan kepatuhan perlu diikuti dengan pembentukan peraturan daerah atau SOP pelaporan ekspor yang memiliki kekuatan hukum jelas. Implementasi Kebijakan Pelaporan Ekspor oleh DISDAGPERIN Boyolali

Pada tahap implementasi, DISDAGPERIN Boyolali menjalankan berbagai langkah seperti, memberikan pengingat administratif kepada perusahaan agar melaporkan data ekspor secara berkala, melaksanakan program sosialisasi dan pelatihan ekspor dan menyediakan forum konsultasi ekspor bagi pelaku usaha. Namun hasil observasi menunjukkan bahwa langkah-langkah tersebut belum berjalan secara konsisten. Pengingat kepada perusahaan lebih banyak dilakukan melalui komunikasi informal melalui *whatsapp* atau *email* pribadi, sehingga efektivitasnya bergantung pada hubungan personal antara pegawai dinas dan staf perusahaan. Selain itu, tingginya tingkat pergantian staf administrasi ekspor di perusahaan menyebabkan komunikasi antar pihak sering terputus. Banyak perusahaan tidak memiliki sistem pelaporan yang terdokumentasi dengan baik. Program sosialisasi yang diadakan DISDAGPERIN juga masih bersifat umum dan belum fokus pada peningkatan kemampuan teknis pelaporan. Hal ini berdampak pada rendahnya pemahaman pelaku usaha, khususnya UMKM tentang tata cara pelaporan melalui sistem nasional seperti Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas). Kondisi ini sesuai dengan teori Administrasi Publik menurut Arderson (2003), kebijakan publik tidak hanya berbentuk keputusan formal, tetapi juga mencakup tindakan atau non-tindakan pemerintah dalam merespon suatu persoalan. Kabupaten Boyolali untuk saat ini, keterbatasan kapasitas birokrasi dan lemahnya koordinasi antara DISDAGPERIN daerah dan Kementerian Perindustrian menyebabkan proses pelaporan belum efektif. Dengan demikian, efektivitas implementasi kebijakan pelaporan ekspor di Boyolali masih tergolong rendah, karena belum didukung oleh sistem birokrasi dan infrastruktur digital yang memadai.

### **Hambatan dalam Pelaporan Ekspor**

Hasil penelitian menemukan tiga kelompok hambatan utama. Hambatan administratif, seperti prosedur pelaporan yang belum seragam dan ketiadaan regulasi yang mengatur sanksi bagi perusahaan yang tidak melapor, hambatan teknis, berupa keterbatasan akses terhadap sistem pelaporan digital (SIINas) dan belum adanya sistem pelaporan terintegrasi di tingkat daerah dan hambatan struktural dan Kesadaran, yakni rendahnya pemahaman pelaku usaha terhadap pentingnya pelaporan ekspor dan persepsi bahwa kegiatan tersebut tidak memberikan manfaat langsung bagi perusahaan. DISDAGPERIN Boyolali juga menghadapi keterbatasan sumber daya manusia di bidang pengawasan ekspor. Pegawai yang menangani ekspor masih sedikit dan memiliki beban kerja tinggi, sehingga kegiatan monitoring pelaporan tidak dapat dilakukan secara intensif. Selain itu, pemerintah daerah tidak memiliki akses langsung terhadap data ekspor perusahaan yang dilaporkan ke Kementerian Perindustrian melalui SIINas. Hal ini menyebabkan terbatasnya kewenangan daerah dalam memantau kepatuhan perusahaan. Hasil ini sejalan dengan temuan Wicaksono (2019) dan Lestari & Handayani (2019) yang menegaskan bahwa hambatan utama pelaporan ekspor di daerah adalah kurangnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah serta keterbatasan infrastruktur digital.

### **Upaya Penguatan dan Pengembangan Sistem**

Sebagai tindak lanjut, DISDAGPERIN Boyolali mulai melakukan beberapa inisiatif, seperti memberikan pendampingan personal kepada perusahaan, membantu proses pendaftaran ke SIINas, dan mendorong koordinasi dengan Kementerian Perindustrian. Namun, sistem pelaporan berbasis digital di tingkat daerah masih belum tersedia. Pemerintah daerah masih bergantung pada sistem pusat, sehingga digitalisasi pelaporan di level lokal menjadi kebutuhan mendesak. Jika sistem pelaporan terintegrasi dapat dikembangkan, maka data ekspor daerah akan lebih akurat dan proses evaluasi kebijakan menjadi lebih efisien. Dalam perspektif teori kebijakan publik Dunn (2003), solusi efektif memerlukan kombinasi antara regulasi, edukasi, dan inovasi teknologi. Artinya, penguatan kapasitas pelaporan ekspor tidak hanya membutuhkan kebijakan yang tegas, tetapi juga sistem digital yang mudah digunakan serta peningkatan literasi administratif bagi pelaku usaha.

### **KESIMPULAN**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa peran Pemerintah Kabupaten Boyolali melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian (DISDAGPERIN) Kabupaten Boyolali dalam menangani hambatan pelaporan ekspor telah dilakukan melalui berbagai upaya seperti sosialisasi, pendampingan, dan pengingat administratif kepada pelaku usaha. Meskipun demikian, implementasi kebijakan pelaporan ekspor belum berjalan optimal karena terkendala oleh faktor regulasi, teknis, dan sumber daya manusia. Secara umum, pelaporan ekspor di Boyolali masih bersifat manual dan

belum sepenuhnya terintegrasi dengan sistem digital nasional (SIINas). Ketiadaan peraturan daerah yang bersifat mengikat dan minimnya sanksi administratif menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan perusahaan dalam menyampaikan laporan ekspor. Selain itu, keterbatasan kapasitas aparatur dan kurangnya koordinasi antara pemerintah daerah dan pusat memperlambat proses evaluasi data ekspor. Untuk meningkatkan efektivitas pelaporan ekspor, pemerintah daerah perlu untuk, membentuk regulasi atau peraturan daerah yang mengatur kewajiban pelaporan ekspor secara tegas, mengembangkan sistem pelaporan ekspor berbasis digital yang terintegrasi dengan SIINas, meningkatkan kapasitas aparatur dan literasi digital pelaku usaha melalui pelatihan berkelanjutan dan memperkuat koordinasi lintas instansi, baik dengan Kementerian Perindustrian maupun lembaga terkait lainnya. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan sistem pelaporan ekspor di Kabupaten Boyolali dapat menjadi lebih efisien, transparan, serta mendukung peningkatan daya saing dan kinerja ekspor daerah secara berkelanjutan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Amir, M. S., 2004, Ekspor–Impor: Teori dan Penerapannya di Indonesia, PPM, Jakarta.
- Anderson, J. E., 2003, Public Policy Making, Houghton Mifflin Company, Boston.
- Ari Susanti, 2025, “Faktor Penentu Kualitas Pelaporan Keuangan UMKM Fashion: Studi Empiris di Surakarta”, Jurnal Akuntansi dan Keuangan Usaha Mikro, Vol. 4, No. 1, pp. 11–20.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Boyolali, 2021, Kabupaten Boyolali dalam Angka 2021, BPS Kabupaten Boyolali, Boyolali.
- Dunn, W. N., 2003, Analisis Kebijakan Publik, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Henry, N., 1999, Public Administration and Public Affairs, Prentice Hall, New Jersey.
- Krugman, P. R., dan Obstfeld, M., 2009, International Economics: Theory and Policy, 8th Edition, Pearson Education, Boston.
- Kusumastuti, R., 2020, “Perkembangan Ekonomi Regional Kabupaten Boyolali dalam Perspektif Investasi dan Perdagangan”, Jurnal Ekonomi Regional, Vol. 8, No. 2, pp. 55–66.
- Lestari, N., dan Handayani, S., 2019, “Hambatan Administratif dalam Pelaporan Ekspor di Indonesia”, Jurnal Administrasi Publik, Vol. 7, No. 2, pp. 101–112.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., dan Saldaña, J., 2020, Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook, 4th Edition, SAGE Publications, Thousand Oaks, CA.
- Pemerintah Kabupaten Boyolali, 2024, Profil Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Boyolali, <https://boyolali.go.id>, diakses tanggal 20 Oktober 2025.
- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018, Tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang dan Jasa, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Jakarta.
- Salvatore, D., 2011, International Economics, 10th Edition, John Wiley & Sons, New York.
- Wicaksono, R. A., 2019, “Digitalisasi Sistem Pelaporan Ekspor dan Implikasinya terhadap Kinerja Industri”, Jurnal Ekonomi Daerah, Vol. 12, No. 3, pp. 45–58.
- Wilson, W., 1887, The Study of Administration, Political Science Quarterly, Vol. 2, No. 2, pp. 197–222.